

PANOPTIKON DAN *HYPOMNEMA* DALAM PENDISCIPLINAN TUBUH NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Churnia Dwi Vellienda

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
churniavellienda16040564070@mhs.unesa.ac.id

Sugeng Harianto

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sugengharianto@unesa.ac.id

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dipandang sekadar sebagai tempat orang-orang bersalah, berdosa, dan terpidana. Namun, sistem pemasyarakatan mengatur tujuan lapas adalah untuk membentuk narapidana menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sistem ini masih menyimpan sejumlah problematika yakni pelanggaran-pelanggaran sosial yang terjadi di dalam penjara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola pendisiplinan, bentuk *panoptisisme*, dan *hypomnema* di Lembaga Kelas I Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif teori Disiplin Tubuh Foucault. Konsep-konsep Foucault yang digunakan diantaranya *Panoptisisme*, *governmentality*, *biopower*, dan *hypomnema*. Data diambil dengan teknik wawancara terstruktur dan observasi. Subjek kajian penelitian ini adalah narapidana dan sipir. Pisau analisis yang digunakan meliputi arkeologi pengetahuan dan geneologi kekuasaan Foucault. Realitas dalam lapas menggambarkan *panoptisisme*, khususnya sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang terdiri dari CCTV, petugas (sipir), arsitektur, menara, dan tamping mampu mendisiplinkan narapidana. Terkecuali arsitektur yang masih diacuhkan oleh sebagian narapidana. Kemudian dua elemen konsep *governmentality* Foucault yang sesuai dengan fenomena di Lapas Kelas I Surabaya yaitu Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan Regulasi. Regulasi atau Tata Tertib secara tertulis tidak membuat dampak apapun bagi narapidana karena kurangnya mereka dalam membaca. Terakhir adalah fenomena *biopower* yakni pembinaan narapidana di lapas sudah berjalan dengan maksimal serta memiliki hasil baik bagi setiap individunya.

Kata Kunci: *Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Disiplin Tubuh, Panoptikon*

Abstract

Correctional Institution sees as a place where people are guilty, sinful and convicted. In the other hand Correctional system arrange the purpose of Correctional Institution is to forms prisoners become behaved society. This system still has a number of problems. This study examines disciplinary patterns, panopticism, and *hypomnema* in Class I Penitentiary in Surabaya. This research using qualitative methods with a Foucaultian perspective. Foucault concept used are including body discipline, *governmentality*, *biopower*, and *hypomnema*. Data collected with structured interview and observation method. This research subjects are prisoners and officers. Analisis method that used is Foucault's archeology of knowledge and genealogy of power. Reality in Correctional Institution shows panopticism, specially vision system. Vision system that include cctv, officer, architecture, tower, and tamping have disciplined the prisoner. Except architecture that unawareable by certain prisoners. Then two concepts that appropriate are Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) and Regulation. Regulation or written rules does not make any effect because they do not read them. The last is *biopower* phenomena which is development program in penitentiary is maximal and gain a good output for every individu.

Keywords: *Prisoners, Correctional Institutions, Body Discipline, Panopticon*

PENDAHULUAN

Penjara sering dimaknai sebagai tempat orang-orang bersalah, berdosa, dan terpidana. Mereka perlu diberikan sanksi hukuman berupa kurungan. Penggunaan diksi penjara kini berganti lembaga pemasyarakatan (lapas). Lapas memberikan pengertian bahwa penjara bukan hanya sekedar merampas kemerdekaan. Lapas juga menciptakan warga kota yang baik usai narapidana menyelesaikan masa hukumannya. Namun, lapas di Indonesia masih memiliki sejumlah problematika. Hal ini terlihat dari beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di lapas.

Pertama adalah kasus Artalyta Suryani yang mendapatkan fasilitas mewah di Rutan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur (Gatra 2018). Kasus kedua adalah Gayus Tambunan yang bisa bebas keluar-masuk lapas untuk bertamasya (Rosarians 2018). Ketiga adalah kasus Freddy Budiman yang bebas mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas (Putra 2016). Selain itu Freddy juga membuat bilik asmara yang digunakan bersama pasangannya. Kasus keempat adalah Agusrin Najamuddin, mantan Gubernur Bengkulu yang mendapat fasilitas mewah di dalam selnya (Firmansyah 2018). Hal ini juga terjadi dalam kasus narapidana Haryanto Chandra (Haryatmoko 2003).

Problematika-problematika dalam lapas seperti kasus di atas telah beberapa kali dikaji dalam penelitian berikut. (Daffanur 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seringkali narapidana tidak merasakan efek jera selama

berada di penjara. Akhirnya mereka melakukan pengulangan tindak kriminal yang disebut narapidana residivis. Kemudian diketahui bahwa hukuman nonfisik yang tidak menyentuh tubuh lebih efektif daripada hukuman fisik. Hal ini dikemukakan oleh (Purba 2014) dalam penelitiannya mengenai disiplin tubuh narapidana. Hasil serupa sebelumnya juga ditemukan dalam penelitian (Carissa 2011). Penelitian ini menceritakan bahwa lapas dijadikan sebagai sarana untuk media menghukum dan proses rehabilitasi. Lapas juga berfungsi untuk menghindari hukuman seperti siksaan atau penganiayaan terhadap fisik. (Fidyastuti 2016)

Disiplin tubuh dalam sistem panoptikon juga menimbulkan efek lain berupa munculnya negosiasi antara petugas dan narapidana. Negosiasi yang dimaksud adalah kesepakatan berupa kompromi antara narapidana dan sipir mengenai pelanggaran peraturan. Praktik ini dikemukakan oleh (Ilmiah 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Panopticon di Liponsos Keputih Surabaya”. Bentuk negosiasi berupa isyarat-isyarat seperti gerakan telunjuk diletakkan di mulut untuk diam dan kibasan tangan agar penghuni masuk ke dalam sel.

Praktik negosiasi juga ditemukan di Penjara Kelas 1 Medaeng. Penelitian ini dilakukan oleh (Muhammaditya 2010). Muhammaditya menemukan bahwa produk negosiasi ini adalah bentuk pengawasan baru oleh petugas yang telah dikompromikan. Petugas Rutan Medaeng mengadakan ruang aspirasi untuk narapidana.

Bentuk konkrit dari hasil negosiasi berupa kebebasan menggunakan alat komunikasi dan melakukan transaksi dari dalam rutan. Negosiasi ini dilakukan oleh ‘napi berduit’ atau narapidana dengan status ekonomi atas (Raditya 2014).

Penelitian kali ini merupakan upaya penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyebutkan mekanisme-mekanisme dalam lapas yang dapat mengurangi efek jera. Penelitian ini juga menjelaskan diskursus sekaligus genealogi kekuasaan membentuk disiplin tubuh narapidana. Selain itu penelitian ini tidak hanya menengarai adanya negosiasi. Namun juga menjelaskan negosiasi dapat terbentuk beserta posisinya dalam sistem lapas panoptikon. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya mengidentifikasi diskursus narapidana tentang sistem pengawasan, *governmentality*, *biopower* dan *hypomnema* yang ada di Lembaga Kelas I Surabaya dengan merujuk rumusan masalah yaitu bagaimana pola-pola pendisiplinan tubuh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dan bagaimana pengetahuan tersembunyi narapidana. Kemudian yang terakhir, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi. Lokasi Lapas Kelas 1 Surabaya belum pernah menjadi bahan kajian mengenai disiplin tubuh dan panoptikon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif Foucaultian. Perspektif Foucaultian digunakan untuk

menjelaskan pendisiplinan tubuh yang ada di Lapas Klas 1A Surabaya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya yang berlokasi di Jl. Pemasyarakatan, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena lapas tersebut merupakan kategori lapas terbesar yang ada di Jawa Timur.

Subjek penelitian adalah narapidana dan sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Peneliti mengambil subjek dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan perspektif Foucault sebagai pisau analisis. Metode arkeologi-genealogi digunakan untuk menganalisis mekanisme kekuasaan dalam lapas. Kaidah pertama, memahami dampak represif dari hukuman. Kedua, menganalisis metode hukuman sebagai teknik umum mengenai cara-cara lain menjalankan kekuasaan. Ketiga, mengarahkan pada cara teknologi kekuasaan menyebar dan ditetapkan dalam sistem tertentu. Keempat, tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan namun juga jatidiri, masa depan, potensi mereka. Perspektif hukum yang baru menghakimi sesuatu selain kejahatan yakni jiwa si pelaku kejahatan (Wiradnyana 2018).

KAJIAN PUSTAKA

Konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu Foucault dalam menjelaskan *Panoptisisme*. Konsep-konsep tersebut antara lain disiplin tubuh, *governmentality*, *biopower*, *Panoptisisme*, dan *hypomnema*. Konsep pertama adalah disiplin tubuh. Disiplin tubuh merupakan sebuah tindakan dan perilaku dalam proses pembentukan penguasaan tubuh individu. Tubuh didisiplinkan untuk menjadi individu yang patuh dan berguna melalui berbagai praktik kekuasaan. Praktik ini dilakukan dalam setiap lembaga institusi dan tanpa disadari oleh individu tersebut. Penerapannya mungkin berbeda, namun antara sekolah, barak tentara, rumah sakit, dan penjara memiliki kemiripan. (Al-Hamdi 2017) turut menyatakan bahwa sekolah telah menjadi penjara. Tubuh menjadi sarana berlangsungnya beberapa relasi kekuasaan.

Relasi kuasa berkaitan dengan melatih, menandai, membentuk, dan menguasai tubuh yang disebut dengan kekuatan disiplin (*Diciplinary Power*). Tubuh merupakan sebuah kekuatan patuh dan produktif melalui penaklukan yang menegakkan teknologi politis pada tubuh. Foucault menyebutkan bentuk-bentuk penaklukan atas tubuh, pemikiran serta dorongan-dorongan dari individu serta strategi untuk melaksanakan hukuman diantaranya.

Konsep kedua merupakan bagian dari skema pendisiplinan tubuh yaitu *governmentality*. *Governmentality* merupakan gagasan mengenai teknologi diri guna untuk mengontrol populasi

dalam sebuah lingkungan. Kontrol dilakukan tanpa menggunakan kekerasan serta dominasi dan tanpa menyentuh tubuh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang patuh dan berguna tanpa menimbulkan resistensi. Konsep ini merupakan implementasi tata pemerintahan dalam sebuah sistem pengendalian lapas.

Persoalan administrasi dan kerapian database menjadi fokus utama pendisiplinan dalam konsep ini. Kelengkapan data mengenai narapidana memudahkan kontrol status dan situasi bagi petugas. Konsep ini menjadi salah satu elemen penting yang berjalan bersama-sama dengan *biopower*. Jika peran *governmentality* adalah mengontrol secara administratif, maka *biopower* menginternalisasi nilai-nilai untuk membentuk tubuh disiplin.

Biopower (bio-pouvoir) merupakan kaitan antara tubuh sebagai *bio* dan *politic will* sebagai *pouvoir* atau kekuasaan. Foucault melihat bagaimana *governmentality* yang merupakan teknologi kekuasaan digunakan pemerintah untuk dapat membentuk *biopower*. *Biopower* bekerja untuk membentuk kepribadian individu sebagai warga yang baik. Seorang narapidana harus bisa berbaur dalam masyarakat dan selalu patuh kepada peraturan bahkan tanpa pengawasan sekalipun.

Konsep selanjutnya adalah *Panoptisisme*. *Panoptisisme* merupakan sebuah model penerapan teknologi disiplin melalui arsitektur sesuai dengan model yang diajukan oleh Foucault. Model arsitektur panoptikon ini dirancang oleh J. Bentham dimana dalam

bangunan tersebut berbentuk lingkaran dengan satu pusat. Pusat ini berguna untuk mengawasi setiap individu yang ada di lingkaran tersebut. Secara umum berupa menara tinggi. Setiap kamar atau ruangan mengelilingi menara ini. Tujuan dari model arsitektur ini adalah menciptakan perasaan selalu diawasi.

Prinsip utama konsep *Panoptisisme* adalah *visible* dan *unverifiable*. Prinsip *visible* artinya individu diletakkan pada pemantauan yang tetap atau permanen. Sedangkan *unverifiable* yaitu individu tidak akan pernah tahu kapan ia diawasi dan kapan ia tidak diawasi. Mekanisme panoptikon ini memiliki tujuan untuk melipatkan gandakan kuasa. Selain itu juga membuatnya lebih ekonomis dan efektivitas bukan hanya kuasa itu sendiri.

Panoptisisme merupakan penerapan dari sistem hukuman baru. Mekanisme disiplin yang dulu diterapkan secara kaku, sekarang lebih fleksibel untuk diterapkan di lembaga. Pemantauan tidak lagi melalui tekanan melainkan menggunakan sistem pengawasan. Pembentukan disiplin ini menjadi cara untuk mengembangkan pelaksanaan kekuasaan yang menyentuh setiap elemen masyarakat.

Konsep yang terakhir adalah *hypomnema*. *Hypomnema* disebut juga sebagai pengetahuan tersebut. *Hypomnema* merupakan konsekuensi atas pembebasan individu untuk mencari tahu. Prinsip panoptikon adalah membiarkan individu menggali pengetahuan dalam lingkup wacana yang dibangun kuasa tertentu. Relasi antara kuasa/pengetahuan dapat

sangat mengun-tungkan bagi sebuah bangunan kuasa. Namun tidak semua orang dapat dikontrol pengetahuannya. Beberapa dari mereka justru menyerang balik dengan pengetahuan tersembunyinya. Pengetahuan-pengetahuan ini yang kemudian disebut *hypomnema*.

Hypomnema selayaknya notebook yang tidak harus menghasilkan kebenaran yang dilihat ataupun diperbaiki melainkan sebagai perbaikan melalui perawatan diri serta pembangunan catatan yang menjembatani untuk diri sendiri yang bersifat permanen (Jacky 2015) . Maka dari itu, sebuah *hypomnema* tidak memerlukan konfirmasi maupun validasi. Ia tidak perlu dibenarkan karena ia membawa wacana yang berbeda.

PEMBAHASAN

Foucault melihat lapas tidak jauh berbeda dengan lembaga “penyembuhan” lain seperti sekolah dan rumah sakit. Ketiganya sama-sama bertujuan untuk membentuk individu yang patuh melalui berbagai proses pendisiplinan. Kekuasaan mutlak diperlukan dalam upaya ini. Ketika menggunakan perspektif Foucaultian, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Proses pendisiplinan tubuh membutuhkan keduanya. Kekuasaan (atas tubuh) diperoleh melalui “rangsangan, persuasi, atau bisa juga melalui paksaan dan larangan” (Haryatmoko 2003) Paksaan dalam hal ini tidak diekspresikan dengan kekerasan. Teknologi

disiplin yang baru dalam sistem *panoptisme* menjadikan paksaan terasa lebih lembut.

Sistem *panoptisme* terdiri dari beberapa bagian yang saling melengkapi. Bagian-bagian tersebut meliputi sistem pengawasan, *governmentality*, dan biopower. Masing-masing bagian memiliki elemen-elemennya. Elemen sistem pengawasan terdiri dari CCTV, arsitektur bangunan lapas, menara, petugas atau sipir, dan tamping. Elemen *governmentality* terdiri dari SDP dan regulasi. Kemudian elemen biopower berupa pembinaan.

Diskursus Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan mendapatkan porsi paling besar dalam panoptisme. Panoptisme mengandalkan pengawasan termasuk memberi perasaan diawasi terhadap para narapidana di dalam lapas. Hukuman kurungan mungkin dijatuhkan oleh hakim, namun hakim tidak memiliki hak untuk mengontrol sampai ke dalam sel. Pengawasan ini dilakukan oleh sistem dalam lapas. Skema yang terjadi di dalam penjara tidak jauh dari yang berlangsung di dalam sekolah maupun rumah sakit. Orang baru bisa keluar ketika secara psikologis dinyatakan “sembuh”. Foucault menyebutnya dengan “bengkel individu modern.”

CCTV

Sistem pengawasan terdiri dari beberapa elemen yang saling melengkapi. Elemen yang pertama adalah CCTV. Fitur utama yang menjadi momok penghuni lapas adalah CCTV merekam dokumentasi dan menyimpannya secara abadi. Selain itu, CCTV juga tidak

pernah tidur. CCTV sebagai benda mati yang bisa bersaksi dan bisa menjadi bukti. Setiap penghuni lapas harus menjaga perilakunya di hadapan CCTV, khususnya sipir dan narapidana. Sebab keduanya sama-sama diawasi. Meskipun begitu, status narapidana lebih membebani dalam menjaga perilaku. Mereka menjadi pusat perhatian sebagai terhukum dan objek yang harus diperbaiki di dalam lapas.

Wacana CCTV yang ada di kalangan narapidana antara lain “biasa saja” dan “takut”. Wacana pertama yang muncul adalah “biasa saja”. Narapidana menyatakan merasa CCTV tidak mengintimidasi mereka dengan ungkapan “biasa saja”. Meskipun tidak merasa diintimidasi ataupun ditekan, narapidana dalam wacana ini tetap menjaga perilakunya di hadapan CCTV. CCTV memiliki kuasa karena hubungannya dengan elemen kekuasaan lain. Selain terhubung dengan kekuasaan petugas pengawas dan sipir, CCTV juga berkaitan dengan kuasa regulasi.

Regulasi termasuk dalam *governmentality* dalam sistem penjara panoptikon Foucault. Keterkaitan antara keduanya ialah perilaku melanggar peraturan yang direkam CCTV menimbulkan hukuman (punish). Hal ini sangat dihindari narapidana. Hukumanlah yang benar-benar menjadi alasan utama mengapa seorang narapidana bersedia mendisiplinkan tubuhnya.

Menjaga perilaku menandakan bahwa CCTV telah berhasil menumbuhkan perasaan diawasi kepada para narapidana. Namun, kata “tidak takut” maupun “biasa saja” menandakan

penerimaan akan kehadiran CCTV sebagai bagian dari kehidupan mereka di lapas. Berbeda dengan perasaan takut sebagai hasil dari perasaan tertekan, perasaan terbiasa merupakan bentuk lain dari penguasaan. Penguasaan diri ini tidak terasa mengekang. Penguasaan yang kuat tidak dihasilkan oleh penindasan dan pemaksaan, melainkan justru berjalan seiring dengan kesadaran (Foucault 2002)

Wacana kedua yang dihasilkan CCTV adalah “takut”. Narapidana menyatakan takut karena mereka merasa terintimidasi dengan kehadiran CCTV. Sama-sama diawasi seperti dalam wacana “biasa”, namun wacana “takut” menggambarkan kekhawatiran yang lebih besar. Seperti terdapat kadar ancaman dalam sistem pengawasan. Wacana “takut” tidak muncul begitu saja. Sebelumnya narapidana yang ada dalam wacana ini telah membangun wacana awal mengenai lapas.

Wacana “biasa saja” dan “takut” sama-sama menggambarkan berhasilnya penguasaan CCTV dalam tubuh individu. Narapidana yang ada dalam wacana ini telah terpanoptikon karena merasa selalu diawasi hingga mendisiplinkan tubuhnya. Sedangkan narapidana yang tidak terpanoptikon adalah narapidana yang tidak mengetahui tentang CCTV. Mereka tidak merasakan kehadiran CCTV karena tidak tahu bahwa mereka diawasi olehnya.

Petugas (Sipir)

Elemen kedua sistem pengawasan adalah petugas (sipir). Petugas anggota Ragu Keamanan (Rupam) menjadi salah satu elemen

paling menakutkan dalam lapas. Pusat dari sistem pengawasan adalah mereka. Sipir menjadi bagian dari petugas ini. Mereka menjadi alasan mengapa semua pengawasan menjadi perhatian penting bagi narapidana. Perasaan diawasi yang ditimbulkan oleh semua elemen dalam sistem pengawasan berguna karena dianggap sebagai “mata” petugas.

Kombinasi kekuatan dalam sistem pengawasan (CCTV, sipir, arsitektur, menara, dan tamping) semuanya kembali kepada petugas (sipir). Petugas sipir membawa wacana “pengawas” itu sendiri bersamanya. Sistem pengawasan memberikan tatapan tidak setara karena narapidana merasa diawasi oleh petugas. Perasaan diawasi tidak selalu menimbulkan konsekuensi tubuh yang patuh. Perlu adanya tatapan tidak setara (*unequal gaze*) berupa pengawas dan yang diawasi.

Narapidana yang telah dilucuti identitas sosialnya diberikan identitas baru di dalam lapas yang posisinya berada di bawah petugas. Posisi ini terkait dengan statusnya sebagai seseorang yang dinyatakan bersalah dan menerima hukuman. Petugas memiliki wewenang secara legal untuk memberikan sanksi jika narapidana melanggar peraturan. Semua ini dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan petugas di hadapan narapidana.

Narapidana memiliki perspektif tertentu dalam memandang seorang petugas atau sipir. Meskipun disampaikan dalam berbagai bentuk diksi, namun wacana besar sipir di kalangan narapidana adalah “menjaga etika ketika berada

di sekitarnya”. Ditemui pernyataan bahwa narapidana tidak merasa takut maupun terawasi oleh petugas. Namun, kalimat selanjutnya menerangkan perasaan tidak takut ini ada karena narapidana merasa tidak melanggar peraturan. Terenggutnya kebebasan oleh peraturan dan segala pembatasan dipandang wajar. Hal ini menandakan panoptikon telah berhasil karena “panoptikon menjalankan fungsi seolah hukuman adalah sesuatu yang alamiah” (Pujileksono 2017) .

Menurunnya intimidasi merupakan konsekuensi dari bentuk komunikasi antara petugas dengan narapidana yang lebih lunak. Beberapa narapidana menyebut petugas sipir “bersahabat” karena bersikap ramah terhadap mereka. Namun, terminologi “bersahabat” ini pada tingkatan tertentu justru menghasilkan pelanggaran. Pelanggaran terjadi karena adanya negosiasi peraturan yang terjadi antara petugas dan narapidana. Sasaran negosiasi ini adalah keteraturan disiplin yang seharusnya berjalan di dalam lapas. Negosiasi ini terjadi karena “adanya hubungan yang intens antara sipir dan narapidana dalam waktu yang cukup lama dan di tempat yang sama” (Pujileksono, 2017: 181)

Praktik negosiasi terjadi di zona negosiasi. Kedua pihak yang terlibat harus mengetahui zona ini, terutama narapidana. Tidak semua narapidana dapat menemukan zona ini. Pengetahuan akan zona negosiasi dipengaruhi oleh pemahaman akan sistem lapas, tingkat pendidikan, akses keuangan, posisi dalam hirarki narapidana, dan hubungannya dengan petugas

(Pujileksono, 2017: 180). Tingkat pemahaman sistem lapas dapat dimanfaatkan untuk mengambil cela dalam zona negosiasi. Terbentuknya zona negosiasi menandakan bahwa di dalam zona tersebut wacana panoptikon tidak berlangsung.

Arsitektur

Elemen sistem pengawasan yang ketiga adalah arsitektur. Arsitektur merupakan “cara langsung pengekspresian proyek disiplin dalam ‘batu’” (Wiradnyana 2018). Desain arsitektur bangunan panoptik secara keseluruhan menghasilkan suatu perasaan selalu diawasi. Arsitek bangunan lapas memiliki kewajiban untuk merancang bangunan penjara yang menempatkan penghuninya seolah menjadi anak ayam dalam kardus. Kemanapun seseorang pergi, ia selalu dalam jangkauan pengawasan.

Arsitektur penjara memberikan konsep transparansi yang maksimal diantara susunan bebatuan dinding penjara. Desain arsitektur harus mendukung agenda individualisasi. Ruang-ruang yang dibangun akan digunakan untuk menerapkan seni penyebaran dan kontrol aktivitas. Seni penyebaran merupakan strategi mengatur narapidana yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kejahatan. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kejahatan akibat persekongkolan dan memudahkan kontrol.

Desain arsitektur panoptikon dibuat seolah selalu ada pengawas yang mengawasi pada sudut-sudut ruang tertentu. Kehadiran pengawas ini dihadirkan dengan simbol-simbol bangunan menara maupun pos penjagaan. Panoptikon oleh

arsitektur bangunan ini efektif jika membentuk disiplin sikap berhati-hati dalam berperilaku.

Sistem pengawasan arsitektur tidak bekerja sendiri. Arsitektur bangunan menciptakan perasaan diawasi dengan bantuan elemen lainnya yaitu petugas. Arsitektur bangunan sekadar benda mati apabila tidak ada asumsi bahwa petugas di sana sedang mengawasi. Maka, ketika narapidana menyatakan berhati-hati pada arsitektur adalah konsekuensi asumsi bahwa petugas mengawasi dari sana. Namun, narapidana tidak terlalu terpanoptikon dengan desain arsitektur Lapas Kelas 1 Surabaya. Pengetahuan yang terbatas mengenai arsitektur membuat mereka tidak paham dan kurang memperhatikan bangunan lapas.

Menara (Pos Atas)

Elemen keempat adalah menara. Wacana yang muncul di kalangan narapidana tentang menara tidak jauh beda dengan wacana tentang arsitektur. Sebagian besar tidak mengetahui keberadaan menara. Pembatasan pengetahuan tentang desain lapas mungkin bertujuan untuk menghindarkan dari narapidana yang berencana kabur. Namun jika keberadaan menara sebagai komponen penting tidak dirasakan, suasana panoptik menjadi tidak lengkap. Menara menjadi bagian dari sistem pengawasan yang sama pentingnya dengan CCTV. Setidaknya menara utama yang berdiri di tengah lapas harus diketahui oleh semua penghuni lapas.

Membangun pengetahuan narapidana akan menara dapat dilakukan dalam proses pembinaan. Skema biopower akan mengatur

pengetahuan narapidana dengan mengkonstruksi wacana mengenai menara panoptikon. Kekuatan wacana semakin besar ketika kehendak untuk mengetahuinya semakin besar. Hal ini disebabkan semakin pernyataan dipercaya maka pernyataan tersebut semakin benar sebagai wacana.

Menilik keterangan mengenai bangunan arsitektur dan menara hanya dari petugas nampaknya cukup berhasil membatasi pengetahuan narapidana. Hal ini nampak dari pernyataan para narapidana yang mengatakan bahwa menara di lapas hanya ada satu. Wacana ini yang paling sering ditemukan dan dipercayai sehingga para narapidana berhati-hati di sekitarnya. Namun, terdapat pula narapidana yang memiliki pengetahuan lebih tentang rahasia dinding lapas dan menara yang mengelilinginya.

Tamping

Elemen terakhir dalam sistem pengawasan adalah tamping. Tamping atau tahanan pendamping merupakan tahanan yang ditunjuk oleh petugas untuk mewakilinya dalam menjaga kondisi lapas. Pelibatan narapidana menandakan bahwa wacana kekuasaan yang telah diperbarui melibatkan kekuasaan sampai tingkat paling bawah. Elemen paling bawah dalam lapas adalah narapidana. Penguasaan tidak menyentuh tubuh secara fisik namun tetap menyentuhnya secara halus.

Wacana lapas harus bisa membuat narapidana mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. 'Diri' dalam hal ini dimaknai sebagai dua hal. Pertama, 'diri' yang dipandang

dari sudut pandang selain narapidana. ‘Diri’ ini merupakan posisi dimana peran dimainkan. ‘Diri’ narapidana adalah diri sesama orang terhukum yang tinggal bersama-sama dalam status yang sama. Kedua, ‘diri’ dimaknai sebagai tubuh individu sendiri yaitu fisik yang dimiliki masing-masing narapidana. Disiplin harus bisa menyentuh dua bentuk tubuh ini.

Ke-‘diri’-an tamping sebagai wujud narapidana itu sendiri sekaligus ada ‘diri’ petugas di dalamnya adalah dengan munculnya wacana yang mirip dengan wacana petugas yakni “bersahabat”. Namun wacana ini sedikit berbeda. Tamping tidak menampilkan kekuasaannya bersama wewenang untuk dapat melakukan suatu tindakan terhadap pelanggaran. Tamping membantu petugas untuk melakukan sebagian tugasnya sekaligus menjalankan perannya sebagai sesama narapidana.

Selain wacana yang ada di lingkungan narapidana, tamping juga memiliki wacana secara umum. Kehadiran tamping tentu sangat bernilai ekonomis. Para narapidana yang diberikan tugas sebagai tamping mengurangi beban tugas bagi petugas. Hal ini dapat menghemat penggunaan SDM yang berarti juga mengurangi jumlah penghuni lapas dan anggaran untuk menggaji petugas. Adanya tamping juga sekaligus membuat narapidana terpilih terbiasa dengan rutinitas kehidupan lapas. Selain itu juga membiasakan bergabung dalam hirarki meskipun namanya tidak tertulis dalam struktur pengurus lapas.

Wacana lainnya tentang tamping adalah “takut”. Perasaan takut ini muncul karena dalam beberapa kasus, tamping menampakkan perannya sebagai kepanjangan tangan petugas dengan sangat mencolok. Tamping melaporkan setiap gerak-gerik narapidana lain yang dirasa sedikit mencurigakan. Maka dalam hal ini tamping juga menjalankan fungsi observasi dan pencatatan. Mekanisme kontrol ini adalah satu pembaruan yang efektif untuk menjaga ketertiban sampai ke dalam sel. Jika setiap tamping mampu membangun wacana “bersahabat namun disiplin”, individualisasi narapidana berjalan lebih mudah.

Diskursus Governmentality

Governmentality berkaitan dengan sistem pemerintahan yang fokus kajiannya tidak selalu tentang negara. *Governmentality* merupakan sebuah politik mikro kekuasaan yang melibatkan tata pemerintahan. Tata pemerintahan ini “tergantung kepada representasi diskursif dari bidang intervensi dan operasinya” (Wiradnyana 2018). Pentingnya *governmentality* dalam sebuah sistem yang panoptik adalah kekuatannya dalam mengatur dan menyusun pemerintahan. Panoptikon tidak hanya mengandalkan pengawasan yang hanya dilakukan secara fisik, namun juga diperlukan pengawasan data.

Pengendalian pertama-tama lebih mudah dilakukan jika semuanya berada dalam kendali. Pemantauan atas situasi dan kondisi di sekitar individu meminimalisir adanya potensi kecurangan maupun tindak kejahatan. Perlu

adanya dokumentasi atas setiap peristiwa yang terjadi untuk mengontrol dan mengevaluasi mengenai keefektifan kinerja sistem. Sebuah sistem database juga sangat membantu ketika terjadi masalah. Petugas maupun narapidana mampu mengakses data mengenai kemajuan catatan baik sampai dengan pelanggaran. Hal ini dilakukan dengan cepat dan efisien.

Governmentality di dalam Lapas Kelas 1 Surabaya terdiri dari dua elemen yakni SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) dan Regulasi. Keduanya dijalankan dalam sistem panoptisme yang mengandalkan wacana dalam pelaksanaannya. Pelaporan teratur, tertata, dan terperinci dapat membatasi gerak individu. Pencatatan setiap aktivitas serta pemberian jadwal melatih mereka untuk hidup teratur. Jadwal-jadwal dipasang dan peraturan ditebar di tembok-tembok lapas. Hal ini untuk membuat mereka selalu waspada dan menanamkan pengetahuan bahwa mereka sedang berada di bawah kendali sistem yakni lapas.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Elemen pertama dari *governmentality* adalah SDP. SDP mendukung “model arsitektur transparan dari model administrasi kuasa” (Petrus Sunu 1997). Ia menyimpan seluruh rekam jejak narapidana dalam sebuah database dengan bentuk dokumentasi permanen. SDP juga menjalankan skema individualisasi terhadap narapidana. Segala informasi mengenai narapidana sangat berguna bagi pemerintah. Lapas berfungsi sebagai suatu wadah pendidikan yang akan menghasilkan individu

berguna bagi masyarakat. Pemerintah memandang narapidana sebagai investasi modal. Narapidana merupakan subjek produktif karena ia “menciptakan ruang yang berguna.”

Kontrol dan observasi terus menerus lagi-lagi ditekankan untuk melengkapi sistem panoptikon. Semua yang ada dalam kendali dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan mempersiapkan antisipasi akan hal pelanggaran. Observasi sendiri adalah wujud kekuatan pengawasan yang dilakukan ketat dan tanpa ampun. Observasi tidak membiarkan narapidana melakukan suatu perbuatan tanpa luput dari pencatatan. Meskipun ketat dan rigid, observasi dan pelaporan yang dilakukan oleh petugas tidak terasa kejam maupun berlebihan.

Regulasi (Tata Tertib Tertulis)

Elemen *governmentality* yang lain adalah regulasi. Bentuk regulasi yang mendapat perhatian dalam hal ini adalah peraturan tertulis. Regulasi merupakan standar paling mudah untuk mengukur tubuh yang patuh. Individu yang disiplin adalah yang tidak melanggar peraturan. Individu yang disiplin adalah individu yang mematuhi peraturan. Kepatuhan dan pelanggaran penghuni lapas diawasi oleh sistem pengawasan, dibuktikan dalam rekam SDP, dan dibentuk oleh pembinaan. Regulasi adalah satu bagian penting ketika menyoal tata pemerintahan atau *governmentality*. Regulasi memberikan batas-batas yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh, serta apa yang seharusnya dilakukan.

Pengetahuan narapidana tentang regulasi tidak sama. Hal ini terkait sosialisasi yang dilakukan petugas terkait regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah berupa peraturan tertulis yang dipasang di beberapa tempat yang sering dilalui oleh narapidana dan petugas. Pernyataan narapidana menggambarkan bahwa narapidana seringkali tidak tertarik untuk membacanya dan tidak begitu memperhatikannya. Meski demikian mereka memahami aturan dasar yang tidak boleh dilanggar. Hal ini menandakan bahwa pemahaman mereka tentang regulasi tidak didapatkan melalui tulisan yang ditempel di dinding. Narapidana paham apa yang tidak boleh dilakukan selama masa hukuman.

Wacana yang muncul untuk regulasi khususnya aturan tertulis adalah narapidana tidak memperhatikan peraturan-peraturan tersebut. Peraturan tertulis yang dipajang di beberapa sudut strategis tersebut bertujuan sebagai peringatan agar narapidana teringat akan regulasi yang ada. Hal ini sekaligus memberitahukan atau mengingatkan kembali sanksi yang didapatkan jika melanggar-nya. Tidak menariknya aturan-aturan tersebut di mata narapidana mengakibatkan mereka tidak merasa diingatkan akan aturan yang ada dalam tulisan tersebut. Regulasi yang dipasang berupa tulisan dalam poster-poster itupun tidak begitu bisa menjalankan fungsi panoptikonnya.

Diskursus Biopower

Biopower adalah salah satu inti dari disiplin tubuh. *Bio-pouvoir* atau biopower digunakan Foucault untuk menjelaskan pertarungan politik

yang dalam strateginya memperhitungkan keterlibatan biologi (tubuh). Melalui biopower Foucault memperjelas bahwa kekuasaan menjadikan tubuh sebagai sasarannya. Tubuh disiplin yang tercipta dari sistem panoptikon adalah hasil dari penguasaan ‘jiwa’. Tubuh disiplin ini dilatih dan dibiasakan dengan aktivitas yang berulang dan terus menerus guna menginternalisasi dan membentuk konstruksi tentang kepatuhan. Pembiasaan dilakukan untuk melatih tubuh agar mudah diatur. Ketidaksiplinan disebabkan lingkungan yang tidak membiasakan disiplin (Mustofa 2019).

Awalnya sistem penghukuman menggunakan penghukuman secara fisik dan dipertontonkan. Foucault menyebut hukuman semacam ini sebagai gagasan balas dendam. Putusan yang dikeluarkan hakim berupa vonis hukuman mati maupun pemenjaraan berubah menjadi beban bagi hakim itu sendiri. Vonis yang ia keluarkan dimaknai sebagai manifestasi seorang penguasa yang melalui kekuasaannya menjatuhkan hukuman pada penjahat yang mengancam kedaulatannya.

Foucault juga mengatakan bahwa “para hakim sendiri secara bertahap membuat perubahan, tanpa mengingini, bahkan tanpa memikul tanggungjawab dari fakta ini benar-benar memahami dengan baik bahwa instrumen-instrumen yang tersedia bagi mereka, yakni hukuman mati, yang sebelumnya merupakan koloni hukum dan dewasa ini berupa hukuman penjara, sebenarnya tidak mengubah siapapun” (Foucault 2002).

Berbagai bentuk kekerasan oleh petugas kepada narapidana kemudian memunculkan protes karena dianggap melanggar HAM narapidana. Diperlukan sistem baru untuk melakukan pendisiplinan dan membentuk kepatuhan tanpa harus menyentuh tubuh narapidana. Lapas dengan sistem panoptikon muncul sebagai salah satu mekanisme kekuasaan yang tepat dalam pengendalian ini.

Menghindari wacana dengan menghindari pengetahuan oleh Foucault disamakan dengan bayi yang menghindari bahasa ketika baru lahir. Berbagai wacana kekuasaan menyelubungi kehidupan manusia dan individu akan terbawa dalam wacana tertentu. Hal ini memudahkan kekuasaan untuk dibangun dengan menyebarkan pengetahuan tertentu dan membentuk wacana untuk melanggengkan kekuasaan tersebut. Lebih lanjut biopower disebut juga pertarungan politik kekuasaan tubuh, karena merupakan pertarungan pembentukan wacana. (Diana 2011)

Penyebaran pengetahuan ini tidak dilakukan kepada semua orang dan di semua tempat. Penyebaran pengetahuan dalam rangka membangun kekuasaan hanya dilakukan kepada sasaran tertentu. Kekuasaan yang bertujuan untuk mengendalikan individu akan lebih kuat ketika berhasil membuat individu bersedia mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini ditemui dalam sistem panoptikon di lapas.

Pembinaan

Pembinaan adalah satu cara menjalankan biopower. Tujuan yang ingin diraih biopower adalah menyebarkan wacana bahwa lapas

merupakan tempat yang selalu terpantau sekaligus tempat memperbaiki diri. Terdapat dua macam pembinaan di Lapas Kelas 1 Surabaya antara lain pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian berkaitan dengan pemberian pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat narapidana. Pembinaan ini lebih kepada nilai ekonomis dan menimbulkan daya guna. Pembinaan kepribadian berkaitan erat dengan pendisiplinan tubuh narapidana.

Memberikan pembinaan kepada narapidana berarti meningkatkan keterampilan (*soft skill*) sebagai bekal setelah keluar dari lapas. Pembinaan juga bertujuan untuk mengalihkan narapidana dari kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya. Keterampilan dan profesionalitas dilatih dan ditingkatkan untuk menghadapi dunia kerja pasca masa hukuman. Ketika narapidana dilepaskan, ia dapat memilih peran baru dalam masyarakat dengan bekal keterampilan dari lapas.

Residivis kasus pencurian dan narkoba biasanya tidak tertarik terhadap kegiatan pembinaan kemandirian. Seperti narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas 1 Surabaya. Mereka lebih tertarik dengan kegiatan pembinaan kepribadian, terutama pembinaan kesadaran beragama. Mereka sangat disibukkan dengan kegiatan pembinaan ini dalam kehidupannya di lapas.

Narapidana yang ‘sembuh’ dan sudah ‘diperbaiki’ digambarkan sebagai individu yang berdaya guna. Sebelum berdaya guna,

narapidana harus diterima oleh masyarakat dan dapat menerima keadaan masyarakat. Pemerintah melalui petugas melakukan pembinaan untuk mencapai kedua hal tersebut. Wacana biopower yang muncul dalam pernyataan narapidana adalah “persiapan menuju kehidupan pasca keluar lapas”. Namun ada juga wacana lain bahwa pembinaan “mempercepat pembebasan bersyarat”. Wacana ini muncul karena setiap kegiatan didokumentasikan dan dilaporkan dalam SDP. Kemudian hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pusat untuk menyetujui permintaan PB yang diajukan narapidana.

Rajin mengikuti kegiatan pembinaan menandakan itikad baik narapidana untuk merubah dirinya. Perubahan ini berupa menjadi lebih disiplin dan menjadi warga negara yang baik. Perubahan-perubahan ini didokumentasikan dalam database narapidana sebagai data hasil observasi kemajuan narapidana untuk kepentingan pemerintah. Individu yang menunjukkan perubahan signifikan bisa menjadi tanda bahwa ia mendekati ‘sembuh’ dan proses ‘perbaikan’ bisa segera dihentikan.

Hypomnema

Hypomnema merupakan pengetahuan tersembunyi yang ada di balik wacana. Pengetahuan ini muncul di luar kendali kontrol. Artinya seseorang memiliki pengetahuan lain selain pengetahuan wacana. Jika wacana merupakan panoptikon, maka *hypomnema* merupakan bentuk oligoptikon. Pengetahuan yang dimiliki tidak hanya berasal satu wacana

kekuasaan, melainkan dari berbagai wacana lain. *Hypomnema* dalam Lapas Klas 1 Surabaya ditemukan dalam bentuk pengetahuan narapidana mengenai sistem menara pengawas dan munculnya zona negosiasi.

Pertama, narapidana mengetahui secara pasti cara kerja menara pengawas. Pengetahuan mengenai cara kerja maupun lokasinya sebenarnya disembunyikan oleh petugas untuk menghindari perencanaan kabur oleh narapidana. Namun seorang narapidana mampu menyebutkan jumlah menara pengawas dan mekanisme sistem pengawasannya. Ia menyebutkan bahwa menara-menara tersebut dijaga setiap waktu oleh petugas. Ia juga mengetahui tentang lonceng di setiap menara yang langsung dibunyikan begitu mendeteksi narapidana kabur. Narapidana ini bahkan mengetahui bahwa setiap lapas memiliki dua lapis dinding. Menara-menara ini terletak pada lapis terluar dinding lapas ini. Pengetahuan ini memperlihatkan bahwa ia tidak hanya dipengaruhi wacana satu arah.

Kedua, bentuk *hypomnema* berupa terciptanya zona negosiasi. Seperti yang telah dijelaskan pada subab sebelumnya, zona negosiasi menghasilkan *negotiated order*. Zona ini tercipta karena adanya pengetahuan-pengetahuan lain yang dipahami oleh narapidana dan mampu memanfaatkannya. Pengetahuan ini adalah tentang sistem kerja lapas, khususnya regulasi dan sistem pengawasan. Pola-pola kontrol yang ada dicari celanya untuk menciptakan sebuah area yang

bebas dari panoptikon. Satu opsi lain yang mungkin terjadi adalah meredefinisi pola panoptikon di sekitarnya. Pola panoptikon diubah menjadi seperti hasil negosiasi yang mereka (petugas dan narapidana) sepakati. Negosiasi ini berupa kompromi atas regulasi yang ada.

SIMPULAN

Wacana ‘panoptikon’ diproduksi oleh Lembaga Kelas I Surabaya melalui beberapa perangkat disiplin. Perangkat ini terdiri dari sistem pengawasan, *governmentality*, dan biopower. Narapidana dianggap masuk dalam wacana pendisiplinan apabila narapidana memberikan pernyataan yang membuktikan dirinya terpanoptikon. Lapas Klas 1 Surabaya termasuk berhasil menerapkan panoptikon, sebab *Panoptisisme* lebih sering dijumpai daripada *hypomnema*.

Terdapat wacana umum yang menggambarkan tiga perangkat disiplin tubuh di Lapas Kelas 1 Surabaya. Pertama, wacana tentang sistem pengawasan yang muncul adalah “biasa saja” dan “takut”. Kedua, wacana umum yang muncul dari *governmentality* adalah mengindividualisasi. Terakhir adalah wacana tentang biopower, yakni “persiapan menuju kehidupan pasca keluar lapas” dan “mempercepat pembebasan bersyarat”. Kekuasaan tidak selalu bermakna negatif. Ia juga berguna untuk mendisiplinkan. Namun kekuasaan juga perlu diwaspadai bahkan dalam bentuk yang paling sah sekalipun. Beberapa

peraturan terdapat agenda kekuasaan yang tidak selalu berpihak pada kepentingan umum. Sebagian darinya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan dan atau penguasa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho. 2017. “Ketika Sekolah Menjadi Penjara: Membongkar Dilema Pendidikan Masyarakat Modern.” *The Journal of Society & Media* 1(1):11–34.
- Carissa, Tharrasita. 2011. “Penjara Sebagai Institusi Koreksi: Kegagalan Penjara Ditinjau Dari Lingkungan Fisik Dan Mental.” Universitas Indonesia.
- Daffanur, Farisa. 2018. “Penjara Yang Tidak Menjerakan.” Universitas Airlangga.
- Diana, Taylor. 2011. *Michel Foucault Key Concept*. Durham: Acumen Publishing Limited.
- Fidyastuti. 2016. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab . Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Firmansyah, Julnis. 2018. “Buntut Keributan Di Lapas Cipinang, 9 Napi Provokator Dipindahkan.” *Tempo.Co* 1–4. Retrieved March 3, 2020 (<https://metro.tempo.co/read/1096622/buntut-keributan-di-lapas-cipinang-9-napi-provokator-dipindahkan>).
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. 1st ed.

- Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Gatra, Sandro. 2018. "Ini 5 Kasus Fasilitas Mewah Di Dalam Penjara." *Kompas.Com* 1–5. Retrieved March 3, 2020 (<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/22/17562741/ini-5-kasus-fasilitas-mewah-di-dalam-penjara?page=all>).
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Ilmiah, Dini Nurul. 2018. "'Panopticon' Di Liponsos Keputih Surabaya." Universitas Airlangga.
- Jacky, Muhammad. 2015. *Sosiologi Konsep, Teori, Dan Metode*. Surabaya: Mitra Wacana Media.
- Muhammaditya, Nur. 2010. "Diskursus Narapidana Memahami Penjara Kelas I Medaeng." Universitas Negeri Surabaya.
- Mustofa. 2019. "Undisciplined Reviewed From the Habitus Pierre Bourdieu Theory." *The Journal of Society and Media* 3(2):142–58.
- Petrus Sunu, Hardiyanta. 1997. *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKis.
- Pujileksono, Sugeng. 2017. *Sosiologi Penjara*. Malang: Intrans Publishing.
- Purba, Ratna. 2014. "Mekanisme Pendisiplinan Para Tahanan Dan Narapidana Di Rutan Klas IIB Tanah Grogot." 2(1):35–48.
- Putra, Pramono. 2016. "Sel Mewah Lapas Porong Layaknya Hotel Kelas Melati." *Sindonews.Com* 1–4. Retrieved (<https://daerah.sindonews.com/read/1102143/23/sel-mewah-lapas-porong-layaknya-hotel-kelas-melati-1461009398>).
- Raditya, Ardhie. 2014. *Sosiologi Tubuh*. Surabaya: Kaukaba.
- Rosarians, Fransisco. 2018. "Berikut Barter Suap Kalapas Sukamiskin Dan Napi Korupsi." *Tempo.Co* 1–5. Retrieved March 3, 2020 (<https://nasional.tempo.co/read/1152733/berikut-barter-suap-kalapas-sukamiskin-dan-napi-korupsi>).
- Wiradnyana, Ketut. 2018. *Michael Foucault: Arkeologi Pengetahuan Dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.